

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAMPUAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM**



Skripsi Oleh:

YESSY ATMASARI

01111002018

Ekonomi Pembangunan

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih

Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2016

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAMPUAN
KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN MUARA ENIM

Disusun Oleh :

Nama : Yessy Atmasari
NIM : 01111002018
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang kajian/Konsentrasi : Ekonomi Keuangan Daerah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian Komprehensif

TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

Tanggal: 31 Maret 2016

Ketua:

Drs. H. Tadjuddin Husin M.sc

NIP. 195211261980121001

Tanggal: 22 - 2. 2016

Anggota:

M. Subardin, S.E., M. Si

NIP. 197110302006041001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAMPUAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM**

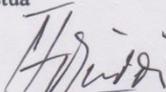
Disusun oleh:

Nama : Yessy Atmasari
NIM : 01111002018
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Ekonomi Keuangan Daerah

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 19 April 2016 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Inderalaya, 19 April 2016

Ketua



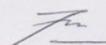
Drs. H. Tajuddin Husin, M. Sc
NIP. 195211261980121001

Anggota



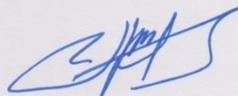
M. Subardin, S.E, M.Si
NIP. 197110302006041001

Anggota



Imam Asngari, S.E., M.Si
NIP. 197306072002121002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Suhel, M.Si
NIP. 196610141992031003

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yessy Atmasari
NIM : 01111002018
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Ekonomi Keuangan Daerah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

Pembimbing:

Ketua : Drs. H. Tadjuddin Husin, M. Sc

Anggota : M. Subardin, S.E, M.Si

Tanggal ujian : 19 April 2016

Adalah benar hasil karya Saya Sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan Saya ini tidak benar dikemudian hari, Saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Inderalaya, 19 April 2016

Pembuat Pernyataan,



Yessy Atmasari

NIM. 01111002018

RIWAYAT HIDUP



Nama : Yessy Atmasari

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Enim,
01 Juni 1993

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Alamat Rumah : BTN KEBAN AGUNG Blok J No. 55 Tanjung
Enim Kec. Lawang Kidul, Kab. Muara Enim
Sumatera Selatan

Telepon/Email : 082276979712/ yessy.atmasari@gmail.com

Pendidikan Formal

SD : SD Negeri 25 Tanjung Enim (1999-2005)

SMP : SMP Negeri 3 Tanjung Enim (2005-2008)

SMA : SMA Bukit Asam Tanjung Enim (2008-2011)

S-1 (Strata 1) : Fakultas Ekonomi, Jurusan Ekonomi
Pembangunan, Universitas Sriwijaya (2011-2016)

Pendidikan Non-Formal : -

Pengalaman Organisasi : -

Penghargaan Prestasi : -

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Muara Enim**. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai Analisis Fator-Faktor Yang Mempengaruhi Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Muara Enim. Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Allah SWT, atas petunjuk, rahmat, ridho, karunia dan segala yang Engkau berikan dalam hidup hamba hingga akhir hayat.
2. Kedua Orang tua yang rela berkorban memberikan segala hal terbaik untuk anaknya, selalu melindungi, memberikan nasihat dan masukan, mendoakan tiada lelah dan selalu membuat penulis bersyukur dan mengingatkan akan kebesaran Allah, SWT.
3. Dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Dosen penguji yang telah membantu memberikan kritik dan saran.
5. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan.

Palembang, 19 April 2016

Yessy Atmasari

ABSTRAK

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

Oleh;

Yessy Atmasari; Drs. H. Tadjuddin Husin, M.Sc; M. Subardin, S.E, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Muara Enim. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder kuantitatif periode 2004 – 2014. Penelitian dilakukan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan metode eviews 6.0 untuk menganalisis variabel-variabel yang diteliti. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Transfer dari Pemerintah Pusat, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim, dan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Derajat Otonomi Fiskal. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa PAD, Transfer Pemerintah Pusat dan APBD berpengaruh signifikan terhadap Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten Muara Enim.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Transfer dari Pemerintah Pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, analisis regresi linier berganda dan metode eviews 6.0

ABSTRACT

THE ANALYSIS OF FACTORS THAT AFFECT THE FINANCE CAPABILITY OF MUARA ENIM'S REGIONAL GOVERNMENT

By ;

Yessy Atmasari; Drs. H. Tadjuddin Husin, M.Sc; M. Subardin, S.E, M.Si

This research is purposed to analyze factors that Influence the finance capability of Muara Enim's regional government. The data used in this research is quantitative secondary data during the year period of 2004-2014. The research is computed using multiple linear regression method in analyzing the influence of all variables. The independent variables are the Locally Generated Revenues (PAD), Transfer from Central Government, and The Expenditure and Budget Revenue (APBD) of Muara Enim regency, and its dependent variable is the degree of fiscal autonomy. The result of this research shows that the Locally Generated Revenues (PAD), Transfer from Central Government, and The Expenditure and Budget Revenue (APBD) have significant impact to the DOF or Degree of Fiscal Autonomy of Muara Enim's regional government.

Key words : Locally Generated Revenue, Transfer From Central Government, and The Expenditure and Budget Revenue, Multiple linear regression and Eviews 6.0 Method.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Teori Desentralisasi	13
2.1.2 Teori Pengeluaran Pemerintah Versi Keynes	16
2.1.3 Teori Makro Pengeluaran Pemerintah	18
2.1.4 Teori Mikro Pengeluaran Pemerintah	19
2.1.5 Teori Penerimaan Pemerintah	20
2.1.6 Teori Transfer Pemerintah	20
2.2 Konsep Dasar Kemampuan Keuangan Daerah	22
2.2.1 Keuangan Daerah	22
2.2.1.1 Pengertian Keuangan Daerah	22
2.2.1.2 Asas Umum Keuangan Daerah	25
2.2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	25
2.2.1.4 Pola Hubungan Keuangan Daerah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	29
2.3 Sumber Pendapatan Daerah	30
2.3.1 Pendapatan Asli Daerah	30
2.3.2 Dana Perimbangan	34
2.3.3 Otonomi Daerah	40
2.4 Penelitian Terdahulu	43

2.5 Definisi Operasional Variabel	48
2.6 Kerangka Pikir	49
2.7 Hipotesis	50
BAB III METODE PENELITIAN	51
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	51
3.2 Jenis dan Sumber Data	51
3.3 Teknik Analisis	51
3.4 Indikator Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah	52
3.4.1 Derajat Otonomi Fiskal	52
3.4.2 Kontribusi Sumber-Sumber PAD	53
3.4.3 Rasio Kemampuan Keuangan Daerah	53
3.4.4 Analisis Regresi Linear Berganda	54
3.5 Pengujian Ekonometrika	55
3.5.1 Uji Asumsi Klasik	55
3.5.1.1 Uji Autokorelasi	55
3.5.1.2 Uji Multikolinieritas	57
3.5.1.3 Uji Heteroskedastisitas	58
3.5.1.4 Uji Normalitas	59
3.6 Pengujian Hipotesis	59
3.6.1 Uji Statistik	59
3.6.1.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	59
3.6.1.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)	59
3.6.1.3 Uji T-Statistik (Uji Parsial)	60
BAB IV HASIL PEMBAHASAN	62
4.1 Gambaran Umum	62
4.1.1 Geografis dan Adm. Pemerintah Kabupaten Muara Enim ...	61
4.1.1.1 Potensi Sumber Daya Kabupaten Muara Enim	64
4.1.1.2 Keadaan Penduduk Kabupaten Muara Enim	68
4.1.1.3 Keadaan Perekonomian Kabupaten Muara Enim	70
4.1.1.4 Pendapatan Perkapita	76
4.1.1.5 Deskripsi Variabel Penelitian	78
4.1.1.5.1 Perkembangan APBD Kabupaten Muara Enim	78
4.1.1.5.2 Perkembangan PAD Kabupaten Muara Enim	80
4.1.1.5.3 Perkembangan Subsidi dan Bantuan Dana	83
4.1.1.5.4 Perkembangan Penerimaan Daerah	84
4.1.1.5.5 Perkembangan Belanja Daerah	85
4.2 Hasil dan Pembahasan	90
4.2.1 Analisis DOF Kabupaten Muara Enim	90

4.2.2	Analisis RKKD Kabupaten Muara Enim	92
4.2.3	Analisis KSPAD Kabupaten Muara Enim	94
4.3	Estimasi Regresi Linier Berganda Pengaruh PAD, Transfer Pemerintah Pusat dan APBD Terhadap DOF di Kabupaten Muara Enim	96
4.3.1	Analisis Uji Statistik	98
4.3.1.1	Koefisien Determinasi (R^2)	98
4.3.1.2	Model Estimasi Regresi Linier Berganda	99
4.3.1.3	Uji F Statistik	100
4.3.1.4	Uji T Parsial	101
4.3.2	Analisis Uji Asumsi Klasik (OLS)	103
4.3.2.1	Uji Autokorelasi	103
4.3.2.2	Uji Multikolinieritas	103
4.3.2.3	Uji Heterokedastisitas	104
4.3.2.4	Uji Normalitas	105
4.4	Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Muara Enim ...	105
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		107
5.1	Kesimpulan	107
5.2	Saran	109
Daftar Pustaka		110
Lampiran		114

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah Kab. Muara Enim Tahun 2004-2014	3
Tabel 4.1 Jumlah Kecamatan, Luas Daerah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kab. Muara Enim Tahun 2014	63
Tabel 4.2 Perkembangan Jumlah Produksi Bahan Tambang dan Bahan Galian Golongan C di Kab. Muara Enim tahun 2012-2014	65
Tabel 4.3 Gambaran Jumlah Produksi Batubara dan Briket di Kab. Muara Enim tahun 2004-2014	66
Tabel 4.4 Jumlah Luas Tanaman Perkebunan (Ha) dan Produksi Perkebunan Rakyat Kab. Muara Enim Tahun 2014	67
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kab. Muara Enim Tahun 2004-2014	69
Tabel 4.6 PDRB Kab. Muara Enim Tahun 2004-2014	71
Tabel 4.7 Laju Pertumbuhan PDRB Kab. Muara Enim menurut Lapangan Usaha Tahun 2004-2014 Atas Harga Konstan 2000	74
Tabel 4.8a Perkembangan Kontribusi Sektor PDRB Atas Harga Berlaku Kab. Muara Enim tahun 2004 dan 2014	75
Tabel 4.8b Perkembangan Kontribusi Sektor PDRB Atas Harga Konstan 2000 dengan Migas Tahun 2004-2014	76
Tabel 4.9 Pendapatan Regional Per Kapita Kab. Muara Enim Konstan 2000 dengan Migas Tahun 2004-2014	77
Tabel 4.10a Realisasi Penerimaan Rutin Kab. Muara Enim Tahun 2004	...	79
Tabel 4.10b Realisasi Penerimaan Rutin Kab. Muara Enim Tahun 2014	...	80
Tabel 4.11 Kontribusi PAD Kab. Muara Enim tahun 2004 dan 2014	...	81
Tabel 4.12 Perkembangan PAD Kab. Muara Enim Tahun 2004-2014	...	82
Tabel 4.13 Subsidi dan Bantuan Dana di Kabupaten Muara Enim Tahun 2004-2014	84
Tabel 4.14 Perkembangan Total Penerimaan Daerah Kab. Muara Enim Tahun 2004-2014	85

Tabel 4.15 Perkembangan Total Belanja Daerah Kab. Muara Enim Tahun 2004-2014	86
Tabel 4.16a Komposisi Total Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2004-2006	87
Tabel 4.16b Komposisi Total Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2007-2009	88
Tabel 4.16c Komposisi Total Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010.....	89
Tabel 4.16d Komposisi Total Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2011-2012	89
Tabel 4.16e Komposisi Total Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013-2014	90
Tabel 4.17 DOF Kab. Muara Enim Tahun 2004-2014	92
Tabel 4.18 Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2004-2014	93
Tabel 4.19a Kontribusi Sumber PAD terhadap Total PAD Kab. Muara Enim tahun 2004-2014	95
Tabel 4.19b Hasil Persentase Kontribusi Sumber-sumber PAD terhadap Total PAD Kab. Muara Enim Tahun 2004-2014	96
Tabel 4.20a Data-data Variabel Independen dan Variabel Dependen Sebelum LN.....	97
Tabel 4.20b Data-data Variabel Independen dan Variabel Dependen Sesudah LN.....	97
Tabel 4.21 Hasil OLS	98
Tabel 4.22 Hasil Uji Autokorelasi	103
Tabel 4.23 Hasil Uji Multikolinieritas	104
Tabel 4.24 Hasil Uji Heterokedastisitas	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kurva Titik Kritis Distribusi (Uji F)	60
Gambar 3.2 Kurva Titik Kritis Distribusi (Uji T)	61
Gambar 4.1 Kurva Uji F PAD, Transfer Pemerintah Pusat, dan APBD Terhadap DOF Kabupaten Muara Enim	101
Gambar 4.2 Kurva Uji T PAD, Transfer Pemerintah Pusat, dan APBD Terhadap DOF Kabupaten Muara Enim	102
Gambar 4.3 Hasil Uji Normalitas	105

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabel Laju Pertumbuhan PDRB Kab. Muara Enim Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004-2014 Atas Harga Konstan 2000	114
---	-----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah ialah suatu wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembangunan daerah dalam otonomi daerah yang didasarkan kepada undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah dan undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang keuangan pusat dan daerah yang merupakan suatu peluang besar bagi daerah untuk mengatur pemerintah dan mengelolah pembangunan sendiri dengan kewajiban yang telah dilimpahkan (Widjaja, 2005 : 7) .

Pembangunan dan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah mewujudkan struktur pemerintah negara yang bersifat desentralisasi. Struktur pemerintah ini menuntut suatu sistem kinerja keuangan daerah dibawah pemerintah pusat yang dapat menjamin kelancaran tugas-tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Suparmoko, 2001 : 16) .

Namun disisi lain otonomi daerah merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat ke pemerintah daerah dimana dengan adanya pelimpahan wewenang tersebut maka diikuti juga dengan sumber-sumber pembiayaan. Dalam menjalankan perekonomian dan pembangunan daerahnya maka pemerintah daerah harus bisa meningkatkan penerimaan daerahnya sehingga bisa memenuhi pengeluaran daerah tersebut. Akibat dari pelaksanaan otonomi daerah itu ketergantungan daerah kepada pusat sangat besar. Daerah yang seharusnya

diberdayakan untuk mengurus rumah tangganya sendiri pada kenyataannya sangat tergantung kepada pemerintah pusat.

Desentralisasi keuangan daerah dapat terwujud sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan jika didaerahnya memiliki kinerja keuangan daerah yang baik. Menurut Yulianti dalam penelitiannya yang berjudul "*Analisis kemampuan keuangan daerah dalam menghadapi otonomi daerah*" menyatakan bahwa kinerja keuangan daerah digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Kinerja keuangan daerah lebih menekankan pada bagaimana suatu daerah dapat mengelola sumber-sumber pendapatan yang ada didaerahnya masing-masing (Daud, 2005 : 5) .

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan pembangunan daerah karena Pendapatan Asli Daerah merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah untuk menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah dan mencerminkan kemandirian suatu daerah. Walaupun Pendapatan asli Daerah tidak seluruhnya dapat membiayai total pengeluaran daerah, namun proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah yang akan mencerminkan kemampuan keuangan suatu daerah (Widjaja, 2002 : 76) .

Kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah. pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang dibutuhkan oleh daerah dapat dilihat dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah Rasio kemandirian keuangan daerah dapat mewujudkan bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (Daud, 2005 : 9) .

Untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pembenahan struktural yang meliputi identifikasi sumber PAD, sistem dan mekanisme pemungutan peningkatan kapasitas dan infrastruktur hukumnya. Semua ini dalam rangka untuk menegakkan prinsip rasa keadilan, kemampuan membayar dan efisiensi pemungutan. Dengan ini pemerintah daerah sangat diharapkan dapat meningkatkannya baik secara intensifikasi dengan menggali sumber-sumber penerimaan yang baru (Daud, 2005 : 2) .

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sedangkan retribusi daerah ialah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan secara khusus atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan-badan tertentu. Retribusi daerah juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap total asli daerah (Daud, 2005 : 3) .

Kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah salah satunya bisa diukur melalui kinerja atau kemampuan keuangan daerah Tim LPEM-FEUI pada Laporan Akhir Kebijakan Desentralisasi dalam Masa Transisi 2000 menyatakan bahwa untuk melihat kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah khususnya dibidang keuangan, dapat diukur dari seberapa jauh kemampuan pembiayaan urusan bila didanai sepenuhnya oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika hasilnya tinggi, maka peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

dan bagi hasil. Jika hasilnya tinggi, maka peranan PAD dalam membiayai urusan semua daerah dinyatakan mampu untuk menunjang kemandirian keuangan pemerintah daerah (Daud, 2005 : 15) .

Kewenangan yang luas kepada daerah dalam mengelola keuangan pada saat desentralisasi dijalankan harus diimbangi oleh sumber daya manusia yang handal baik dalam semua perencanaan, alokasi, maupun pelaksanaan anggaran daerah. Dana alokasi umum yang pengaturan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah (*block grant*) dilihat perlu diberikan rambu-rambu dalam pelaksanaannya, sehingga tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk mengurangi ketimpangan fiskal (*fiskal gap*) dapat tercapai (Daud, 2005 : 20).

Di dalam Otonomi daerah selalu identik dengan yang namanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang sering disebut APBD. Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. Kedudukan faktor keuangan dalam penyelenggaraan suatu pemerintah sangat penting, karena pemerintahan daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan pembangunan dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Suatu daerah otonom diharapkan mampu/mandiri di dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proposal yang lebih kecil dan Pendapatan Asli Daerah harus menjadi bagian yang terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan

pemerintah daerah. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila PAD dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah demi mewujudkan tingkat kemandirian dalam menghadapi otonomi daerah.

(Mardiasmo, 2003 : 35) mendefinisikan anggaran sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Mardiasmo mendefinisikannya sebagai berikut, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan belanja dan aktifitas.

Menurut UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara disebutkan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lebih lanjut dijelaskan dalam PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan peraturan daerah ekonomi. Inisiatif peningkatan perencanaan, pelaksanaan, dan keuangan pembangunan sosial ekonomi diharapkan dapat menjamin digunakannya sumber-sumber daya pemerintah secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan local.

Dalam jangka panjang peningkatan APBD mampu memberikan stimulus terhadap pertumbuhan perekonomian daerah. Kondisi ini akan dapat tercapai apabila kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah akan dapat mendorong berkembangnya dunia usaha. Selain itu untuk mengetahui tingkat

kemandirian suatu daerah tersebut kita dapat lihat dari perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan dana perimbangan dari pemerintah pusat, yaitu jika pendapatan asli daerahnya lebih besar dari dana perimbangan maka daerah tersebut sudah bisa dikatakan mandiri tetapi jika pendapatan asli daerahnya lebih kecil maka daerah tersebut belum mandiri.

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, akan memberikan indikasi yang baik bagi kemandirian keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah dalam mengatur tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat dan dalam rangka mempercepat pembangunan disegala bidang. Pemerintah daerah harus dapat mengidentifikasi kapasitas fiskal atau sumber-sumber yang dimilikinya serta mempunyai kemampuan untuk menyerap penghasilan daerah, baik dalam bentuk pajak maupun dalam bentuk lainnya dari sumber yang ada (Hasniah, 2005 : 3) .

Selain itu tinggi rendahnya Pendapatan Asli Daerah dapat juga ditentukan oleh potensi yang dimiliki oleh daerah itu tersebut dan bagaimana cara pemerintah daerahnya tersebut dapat mengembangkan PAD yang dapat dilihat dengan kontribusi PAD terhadap Penerimaan Daerah, tingkat kemampuan PAD dalam membiayai pengeluaran rutin dan kemandirian keuangan daerah yang akan meningkatkan kemampuan keuangan daerah tersebut.

Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu daerah otonom yang berada dalam wilayah provinsi Sumatera Selatan yang dikategorikan memiliki tingkat penerimaan daerah yang berasal dari post pendapatan asli daerah yang terbesar diantara kabupaten-kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Akan tetapi, dengan besarnya tingkat penerimaan daerah kabupaten Muara Enim belum bisa dianggap mampu melaksanakan otonomi daerah, karena untuk melihat kemampuan daerah

dalam menjalankan otonomi daerah dapat diukur melalui derajat otonomi fiskal, dan kemandirian keuangan daerah yang dimiliki Kabupaten Muara Enim.

Suatu daerah otonom dikatakan mampu melaksanakan otonom terletak pada kemampuan keuangan daerahnya, artinya agar benar-benar menjadi daerah yang otonom, untuk itu Kabupaten Muara Enim harus seminimal mungkin ketergantungannya kepada pemerintah pusat dengan menjadikan Pendapatan Asli Daerah khususnya sebagai bagian yang signifikan bagi sumber keuangan daerah agar terciptanya kemandirian keuangan daerah yang akan meningkatkan kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Muara Enim. Gambaran perkembangan Pendapatan Asli Daerah kabupaten Muara Enim dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 1.1

**Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muara Enim
(dalam Ribu Rupiah)**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (dalam ribu rupiah)	Pertumbuhan %
2004	27.059.124	9,69
2005	33.494.774	23,78
2006	40.449.662	20,76
2007	42.734.016	5,64
2008	56.053.044	31,16
2009	69.689.407	24,32
2010	67.530.328	-3,09
2011	86.937.486	28,73
2012	98.591.020	13,40
2013	116.403.670	18,06
2014	138.705.896	19,51
Rata-rata		17,478

Sumber: BPS Sumatera Selatan, Muara Enim Dalam Angka Tahun 2004-2014

Dari tabel 1.1 dapat dilihat perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Muara Enim Selama rentang waktu tahun 2004-2014 perkembangan PAD Kabupaten Muara Enim terlihat semakin meningkat. Pada tahun 2004 PAD

Kabupaten Muara Enim berjumlah Rp 27.059.124. Pada tahun 2014 mengalami peningkatan yang cukup tinggi dengan rata-rata pertumbuhan PAD sebesar Rp 138.705.896 dengan persentase pertumbuhan sebesar 19,51 % .

Kebijakan desentralisasi keuangan daerah bertujuan untuk : pertama, memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah. Kedua, menciptakan sistem pembiayaan yang adil, proposional, rasional, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab. Serta yang terakhir mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah (Pasrah, 2007: 8) . Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Abdul Halim, 2004) .

Kemandirian Keuangan daerah bisa dicerminkan dari perkembangan naik atau turunnya Derajat Otonomi Fiskal (DOF) disuatu daerah. Jika DOF naik maka kemampuan keuangan suatu daerah tersebut mampu dalam membiayai pelaksanaan pemerintah, pembangunan serta pelayanan terhadap masyarakat, sedangkan apabila DOF turun maka kemampuan keuangan suatu daerah tersebut belum mampu dalam membiayai pelaksanaan pemerintah, pembangunan serta pelayanan terhadap masyarakat.

DOF bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya PAD, Transfer Pemerintah Pusat, dan APBD. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (seluruh penerimaan daerah yang bersangkutan), sehingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah erat kaitannya dengan kemandirian keuangan suatu daerah. Menurut Santoso (1995), walaupun PAD tidak dapat seluruhnya

membiyai APBD, tetapi proporsi PAD terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah. Hal yang sama dikatakan Kuncoro (1995) bahwa indikator desentralisasi fiskal adalah rasio antara PAD dengan total APBD.

Penentuan tolak ukur kemampuan keuangan daerah dilihat dari rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) tersebut dinilai wajar mengingat sebagian besar sumber penerimaan di daerah telah dijadikan pajak sentral dan dipungut oleh Pemerintah Pusat, sehingga kontribusi pajak daerah dan retribusi serta Pendapatan Asli Daerah lainnya terhadap total penerimaan daerah sangat kecil. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Pemerintah Pusat mengategorikan bagi daerah yang rasio PAD terhadap TPD berada diatas 30 persen dinyatakan cukup mampu dalam pelaksanaan otonomi dilihat dari sisi keuangannya.

Menyadari hal tersebut Pemerintah Pusat setiap tahun anggaran selalu memberikan subsidi dan bantuan kepada daerah PAD diharapkan menjadi salah satu sumber APBD yang paling dominan karena kemampuan suatu daerah dalam membiayai urusan rumah tangganya dapat dilihat dari besar kecilnya PAD tersebut. Tanpa tersediannya sumber keuangan ini, maka akan kesulitan bagi daerah dalam upaya melaksanakan pelayanan dan pembangunan bagi masyarakat secara efektif dan efisien (Kaho: 1997).

Dari penjelasan diatas dapat kita lihat bahwa Pendapatan Asli Daerah, Transfer Pemerintah Pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat mempengaruhi Kemampuan keuangan daerah dan Derajat Otonomi Fiskal (DOF).

Berdasarkan fenomena-fenomena dan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisis tentang ***“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Muara Enim”***

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang penulis angkat dalam makalah ini ialah :

1. Bagaimana fenomena dan perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah dan Derajat Otonomi Fiskal (DOF) ?
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Transfer Pemerintah Pusat, dan APBD terhadap Derajat Otonomi Fiskal (DOF) di Kabupaten Muara Enim?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulis mengangkat masalah-masalah dalam makalah ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis fenomena dan perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah dan Derajat Otonomi Fiskal (DOF) di Kabupaten Muara Enim.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Transfer Pemerintah Pusat, dan APBD terhadap Derajat Otonomi Fiskal di Kabupaten Muara Enim.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Akademis

Dapat memberikan kontribusi yang berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang ekonomi khususnya ekonomi pembangunan ini

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan informasi ilmiah bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan menjadi bahan acuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui berbagai pendekatan / teoristik, temuan berbagai lanjutan mengenai Kemampuan Keuangan daerah dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan kebijakan ekonomi dalam pembangunan di Kabupaten Muara Enim.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, Triana. 2007. Kausalitas Antara Sumber-Sumber PAD dengan Pertumbuhan Ekonomi Sektoral di Kota Palembang. *Tesis* PPS Universitas Sriwijaya, Tidak dipublikasikan. Palembang.
- Asngari, Imam. 2007. Modul Praktikum Ekonometrika Program EvIEWS dan SPSS. Indralaya : Universitas Sriwijaya.
- Badan Pusat Statistik Sumatra Selatan, 2004-2014. *Muara Enim dalam Angka* Palembang: BPS.
- Basri, Faisal, 2002. Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Indonesia. Erlangga, Jakarta.
- Boediono, 1999. Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta: BPFE.
- Boex, Jameson. 2002. Intergovernmental fiscal relations and subnational public finance in Nigeria. Georgia State University.
- Broadway, Robin dan Shah, Anwar. 2007. Public Sector Governance and Accountability Series. Intergovernmental Fiscal Transfer Principle and Practice. The World Bank
- Darise, Nurlan. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah. Penerbit PT. Indeks: Jakarta.
- Darwin, Jhon. 2002 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat-Daerah Kasus Propinsi Sumatera Selatan. *Tesis*. Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya, Tidak dipublikasikan. Palembang.
- Daud, 2005. Analisis pendapatan asli daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah dikabupaten OKI Palembang. *Tesis*. Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya. Tidak diPublikasikan. Palembang.
- Davey, Kenneth. 1988. Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga. Cetakan Pertama. Terjemahan oleh: Amanullah dkk. Penerbit Universitas Sriwijaya (UI-Press), Jakarta.
- Dwirandra. Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Propinsi Bali Tahun 2002-2006. <http://www.google.com>. Diakses bulan Januari 2015.
- Fahmi, Irham. 2010. Analisis Laporan Keuangan. Cetakan: Kedua. Bandung. Alfabetz.
- Ghozali, I. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Cetakan IV. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

- Gunawan, Bondan. 2000. "Apa Itu Demokrasi?". Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2001. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat: Jakarta.
- Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat: Jakarta.
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul dan Damayanti, Theresia. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi: Kedua. Cetakan: Pertama. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
- Hasniah, Yan. 2005. Analisis Kapasitas Pajak (Tax Capacity) dan Usaha Pajak (Tax Effort) Kabupaten Muara Enim. *Tesis*. Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya. Tidak dipublikasikan. Palembang.
- Hidayat, Dian. 2006. Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Palembang. *Skripsi*.i Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Tidak dipublikasikan.
- Hoessein, Bhenyamin. 2005 Naskah akademik Tata Hubungan Kewenangan Pemerintahan Pusat Dan Daerah. PKPADK Fisip UI. Jakarta.
- Hoogerwerf, 1983. Ilmu pemerintahan. Terjemahan R.L.L. Tobing. Jakarta: Erlangga
- Kaho, Josep, Riwu, dkk 1984. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya pendapatan asli daerah tingkat II, laporan penelitian, Fisipol UGM dan Depdikbud. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad, 2004 Otonomi dan Pembangunan Daerah. Erlangga : Jakarta
- Lin, Justin Yipu, dan Ziqiang Liu, dkk. 2000. Fiscal Decentralization and Economic Growth in China. <http://www.google.com> . Diakses bulan Januari 2015.
- Makmun, Purwiyanto. 2004. Potret Perekonomian Daerah Sebelum dan Sesudah Desentralisasi Fiskal. 8: 6.
- Mamesa. DJ. 1995. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. PT. Gramedia Pustaka. Jakarta.
- Mangkoesoebroto, Guritno. 2000. Ekonomi Publik, Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Marcelina, Mira. 2008. Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemampuan Keuangan Daerah Kota Palembang. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Tidak dipublikasikan.

- Mardiasmo, 2002. Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah. *Jurnal Ekonomi Rakyat*. No.4 – Juli 2012.
- Mardiasmo, 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi : Yogyakarta.
- Mujiwardhani, Alfian 2008. “Analisis Kemandirian Daerah Kabupaten Cilacap Sebelum dan Selama Otonomi Daerah (Tinjauan Keuangan Daerah)”. Skripsi FE UNS Surakarta. Tidak dipublikasikan.
- Nachrowi, Usman Hardius. 2006. Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan. Jakarta: Penerbit FEUI.
- Pasrah, Rudi. 2007. Analisis Kinerja dan Kemandirian Keuangan Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan .*Tesis*. Tidak dipublikasikan. Palembang.
- Purnama, Hadi dan Moch Inchsana, dkk. Prospek Kewenangan Daerah dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). <http://www.google.com>. Diakses Januari 2015.
- Rasyid, Muhammad Ryaas, 2003. Makna Pemerintahan – Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan, Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widya.
- Ruiter, A. 1979. *Color of Smoked Foods*. *Food Technol.* 33 (5) : 54-63.
- Santoso, Bagus. 1995. “Retribusi Pasar Sebagai Pendapatan Asli Daerah” : *Studi Kasus Pasar Kabupaten di Sleman*. *Prisma*. No. 4. 19 – 28
- Setya Yudha, Teddy. 2007. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kota Palembang Pada Era Otonomi Daerah. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya . Tidak dipublikasikan.
- Seymour, Richard dan Sarah Turner. 2002. Otonomi Daerah : Indonesia’s Decentralisation Experiment. <http://www.google.com>. Diakses bulan Januari 2015.
- Siahaan, Marihot. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Suparmoko, Muhammad, 2001. Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. Andi : Yogyakarta.
- Syarifuddin, Ateng. 2000. Pengaturan koodinasi Pemerintah di Daerah. Citra Aditya. Bandung.
- Tjandra, W Riawan. 2004. *Hukum Administrasi Negara*. UAJY. Yogyakarta.

- Ubaedillah, Abdul Rozak ,A. 2006 Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, ICCE Uin Syarif Hidayatullah, Edisi Revisi. Jakarta.
- Ulbrich, Holley. 2003. Public Finance in Theory and Practice. United States: South-Western. Thompson Learning.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah, dalam Sepuluh Undang-Undang 2004. Jakarta: CV. Eko Jaya.
- Waluyo, 2007. Perpajakan Indonesia. Buku 1 Edisi 7. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Wibowo, I, 2004. Globalisasi Kemiskinan dan Ketimpangan. Yogyakarta. Penerbit Cidelaras Pustaka Rakyat Cerdas.
- Wibowo, Harmanto Yuandhi. 2006. “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Pada Masa Otonomi Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 1996/1997-2005)”. Skripsi FE UNS Surakarta. Tidak dipublikasikan.
- Widarjono, Agus. 2013. Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya. Edisi keempat. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Widjaja, HAW. 2002. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Widjaja, HAW. 2005. Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Yuwono, Sony, dkk. 2005. Penganggaran Sektor Publik. Malang: Bayu Media.
- Yuwono, Sony, et al. 2008. APBD dan Permasalahannya. Malang: Bayumedia Publishing.
- Yani, Ahmad. 2008. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia Edisi Revisi. Penerbit : Rajagrafindo Persada, Jakarta.